

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP KESADARAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI SMK PGRI 1 CIMAH JAWA BARAT

Eneng Martini¹, Idham Azwar², Febri Setia Pringga³

^{1,3}Program Studi PPKn, Jurusan PIPS STKIP Pasundan, Jl. Permana No 38B Cimahi Jawa Barat

²Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Pontianak
Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak – 78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855

Email: eneng.martini13@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini peran generasi muda dalam menentukan pilihan menjadi strategis karena dianggap awam dan sasaran empuk politik, sehingga perlu peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai politik yakni dapat dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan politik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih pemula (siswa) dalam mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode survey, Hasil penelitian menggunakan sekala likert menunjukkan rata-rata responden setuju bahwa pendidikan politik (Variabel X) dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan dengan 79,54% setuju, dan 71,38% menyatakan terpegaruh dalam berpartisipasi (Variabel Y), dan pengaruh yang di hasilkan pendidikan politik (Variabel X) terhadap partisipasi pemilih pemula (Variabel Y) dengan menggunakan metode regresi sederhana sebesar 29,1%.

Kata kunci: Pendidikan politik, Partisipasi, Pemilih pemula

Abstract

Nowadays, the role of the young generation in determining the choice becomes strategic because it is considered lay and soft target of politics, so it is necessary role of education in inculcating political values that can be through Civics Education implemented. This study aims to determine the effect of political education in the subjects of Pancasila and Citizenship Education on the participation of novice voters (students) in following the election of Cimahi City Regional Head. This research uses Quantitative approach with survey method. The result of research using Likert scale shows that the average of respondents agree that political education (Variable X) in Pancasila and Citizenship education subjects with 79.54% agreed, and 71.38% stated terpegaruh in participate (Variable Y), and the effect of political education (Variable X) on the participation of beginner voters (Variable Y) using a simple regression method of 29.1%.

Keywords: Political education, Participation, Novice voters

PENDAHULUAN

Demokrasi sering dijadikan hubungan antara rakyat dan penguasa karena demokrasi merupakan suatu sistem bernegara yang hampir seluruh negara di dunia menggunakannya. Pelaksanaan demokrasi salah satunya adalah adanya partisipasi warga negara dimana salah satunya dalam bentuk melalui mekanisme pemilihan umum untuk memilih pemimpin, di Indonesia sistem pemilihan umum merupakan metode untuk proses memilih wakil rakyat (Legislatif) dan pemimpin pemerintahan (Eksekutif). Dalam pelaksanaan pemilihan umum salah satunya diikuti sertakan mengenai pemilih pemula dalam hal ini Pemilih pemula terkadang mereka masih tabu dalam menentukan pilihan mereka, pada dasarnya seseorang dengan ketidaktahuan akan cenderung mengikuti pilihan yang dipilih dilingkungan keluarganya atau masyarakat, juga teman sebaya, bahkan bisa saja tidak memilih sama sekali karena kurang rasa berpolitiknya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Juanda (2012) dengan judul Pengaruh Pembelajaran PKN Sebagai

Pendidikan Politik Terhadap Perilaku Memilih Pemilih Pemula (Kabupaten Aceh Timur), hasil penelitiannya menyebutkan antara materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran PKn yang paling berpengaruh besar berpengaruh secara signifikan terhadap *voting behavior* pemilih pemula dengan nilai korelasi sebesar 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa materi PKn berkontribusi sebesar 19,71%. Dan yang paling rendah adalah mengenai evaluasi yang mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,009. Selanjutnya Hemafitria, H. R. (2016) melaksanakan penelitian serupa dengan judul Pembelajaran Pkn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula, menemukan bahwa:

Pembinaan partisipasi pemilih pemula secara nyata di sekolah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan arahan tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara, membangun sikap demokratis dan kebersamaan, dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, pembinaan partisipasi politik pemilih pemula dilaksanakan dengan menyelenggarakan diskusi kelas dengan tema politik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan politik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk turut serta dalam aksi politik

Berdasarkan latar belakang di atas maka dengan pendidikan politik (melalui mata pelajaran PKn) inilah pemilih pemula akan mengetahui tentang ilmu politik yang di dalamnya membahas tentang pemilihan umum, baik itu di kelas maupun diluar kelas yang tidak lepas dari materi, metode, media, sumber dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang. Tujuan penelitian ini peneliti ingin mengetahui besaran pengaruh pembelajaran politik, tingkat kesadaran partisipasi pemilih pemula, dan apakah terdapat pengaruh pembelajaran politik terhadap kesadaran partisipasi pemilih pemula (siswa) di SMK PGRI 1 Cimahi.

Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan merupakan modal utama untuk suatu bangsa dalam memajukan warga negaranya dan meningkatkan bangsa lebih baik. Dalam mewujudkan suatu bangsa yang baik tidak terlepas dari partisipasi warga negara salah satunya yaitu dalam dunia politik. Pendidikan politik secara formal diajarkan dalam bentuk mata pelajaran khusus, yang dirumuskan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education/ Citizenship Education*, didalamnya mengajarkan mengenai aspek kenegaraan dan turunannya, dan politik sangat jelas di ajarkan.

Menurut Azra dalam bukunya Hamid dan Lutfi (2010: 76-77) Pendidikan kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas daripada pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena

mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara dan sistem terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antar budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Sedangkan Zamron dalam bukunya Hamid dan Lutfi (2010: 77) Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktifitas penanaman kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selain itu pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap, perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan tidak serta merta tanpa sebab musabab, salah satunya dari segi sejarah dimana keberadaan pendidikan kewarganegaraan ini untuk mempelajari upaya bangsa Indonesia dalam meraih dan mencapai kemerdekaan juga menegakan tiang kemerdekaan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan menurut Yuniarto (2013: 191) Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada intinya adalah *to be good and smart citizenship* (menjadi warga negara yang baik dan cerdas).

Pendidikan Politik

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *politiea*, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara atau *teia*, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Menurut Budiardjo M. (2008:13) Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Sedangkan menurut Sunarso (2007:19) Politik secara ringkas adalah sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya.

Dengan demikian dibutuhkan pendidikan dalam menransferkan mengenai politik tersebut baik secara formal maupun non formal, Sunarso (2007:23-24) Pendidikan politik itu adalah suatu proses

penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Tujuan dari pendidikan politik yang dikemukakan oleh Sunarso (2007:23) Tujuan pendidikan politik yang terpenting adalah kesadaran warga negara tentang hak kewajiban sesuai dengan konsitusi. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang terpenting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum.

Partisipasi Politik

Keberhasilan suatu sistem pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar presentase masyarakat yang mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut, sehingga dalam ajang-ajang menjelang pemilihan umum biasanya gencar para politikus, partai dan lembaga politik juga *stick holder* (pemangku kebijakan) mengajak masyarakatnya ikut dan turut serta dalam kancah politik atau sering populer dengan istilah pesta demokrasi, hal inilah yang di harapkan dimana partisipasi dalam pesta demokrasi bisa diikuti banyak pihak tanpa tekanan, bebas, jujur, rahasia. Langsung, umum, dan adil. Adapun definisi berkaitan dengan partisipasi menurut Budiardjo, M. (2008:367), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Subakti (2010: 144) Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Dengan adanya kesadaran dan kepercayaan dari partisipasi politik hal ini sangat banyak sekali keuntungannya bagi pemerintah, karena mendapatkan penilaian dan penilaian itu digunakan sebagai pemicu ke arah yang lebih maju.

Pemilih Pemula dan Pemilihan Umum

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. Umur sudah 17 tahun
- b. Sudah / pernah kawin; dan
- c. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian.

Para pemilih pemula berperan aktif dalam kegiatan pemilu dimana pemilu itu sendiri merupakan Mekanisme penyeleksian dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai dalam menjalani kehidupan dan bernegara. Pasal 3 tentang hak memilih berbunyi “warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Begitupun bunyi pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hipotesis

H1: Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran politik dengan partisipasi pemilih pemula (survei penelitian tentang pemilukada walikota Cimahi kaitannya dengan mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi)

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran politik dengan partisipasi pemilih pemula (survei penelitian tentang pemilukada walikota Cimahi kaitannya dengan mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi).

METODE

Objek dalam penelitian ini adalah sebagian siswa yang ada di SMK PGRI 1 Cimahi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya penelitian yang hasilnya berupa hasil yang berbentuk angka-angka atau persentasi dari sebuah masalah yang di teliti dengan menggunakan metode penelitian Survei. Nazir (2005: 56) Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual , baik tentang intitusi sosial, ekonomi, ataupun politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

Definisi Operasional Variabel
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Pendidikan Politik (X)	Sunarso (2007:23-24)“Pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana bisa bersifat formal	Penanaman nilai-nilai politik Berpartisipasi dalam politik Kesadaran akan hak dan kewajiban	Likert

	<p>maupun informalo, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.</p>		
<p>Partisipasi Pemilih Pemula (Y)</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Subakti (2010:144) “Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.” Sedangkan Subakti (2010: 144) “Kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik) ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah :apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak?”</p>	<p>pertama jika seseorang memiliki tingkat kesadaran politiknya disertai kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka bentuk partisipasi yang dihasilkannya adalah cenderung partisipasi aktif kedua, ketika kesadaran politik seseorang dan disertai tingkat kepercayaan kepada sistem politik atau kepada pemerintahan rendah, maka bentuk yang dihasilkan adalah partisipasi cenderung fasif-tertekan (apatis) Kemudian ketiga, jenis partisipasi berbentuk militan radikal, dimana kesadaran politik tinggi namun tidak disertai dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah Selanjutnya keempat, ketika tingkat partisipasi politik sangat</p>	<p>Likert</p>

		rendah namun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif/pasif.	
--	--	---	--

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di SMK PGRI 1 Cimahi yang sudah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu atau secara umum mereka yang sudah 17 tahun lebih. Penentuan sampel adalah menggunakan Probability sampling dimana sebuah sampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang memberikan sebuah peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampling.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama yang digunakan adalah menggunakan Kuesioner (angket), berupa angket tertutup dengan pedoman-pedoman yang sudah disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengumpulkan data-data dari sumber primer (siswa), juga data sekunder berupa dokumen berkaitan dengan jumlah, data sekolah, dan data-data yang dibutuhkan dalam mengisi laporan hasil penelitian tersebut. Angket digunakan dikarenakan penggunaan metode deskriptif dengan model survey, dimana survey harus memenuhi syarat minimum sample >100 maka angket lebih cocok dari segi waktu, biaya, tenaga, dan efisiensi bagi peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik data primer dan sekunder, dimana data primer adalah data yang berasal sumber utama yang secara langsung menyentuh pokok permasalahan baik objek dan subjek penelitiannya, dalam hal ini sumber utama adalah siswa kelas XI SMK PGRI 1 Cimahi. Sumber selanjutnya adalah sumber sekunder atau sumber tambahan guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah, dalam hal ini sumber sekunder dikategorikan sebagai data-data yang didapatkan dari lembaga atau dalam hal ini adalah data sekolah bersangkutan, maupun data RPP, silabus dan data-data yang sekiranya dibutuhkan. Adapun secara khusus, peneliti menggunakan pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data bisa dilakukan ketika data-data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sudah di dapatkan guna menuju tahap berikutnya yakni menganalisis data, dalam menganalisis

data bisa dikatakan bahwa analisis data melakukan sebuah kegiatan menilai, mengukur, membandingkan data-data guna mencari hasil. Dalam penelitian ini menggunakan dengan :

1. skala pengukuran / skala likert

Tabel 2. Tingkat Kekuatan Sekala Likert

Pernyataan	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Ragu-Ragu/Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

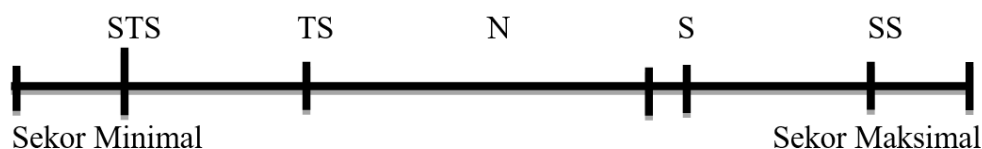
Rumus menghitung sekala:

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban Responden}}{\text{Sekor Ideal}} \times 100\%$$

Diketahui:

- 1) Jumlah Jawaban Responden adalah total jumlah dari hasil jawaban yang didapatkan dari responden melalui sekala likert dengan banyak yang menjawab sekor (+) 5, 4, 3, 2, 1.
- 2) Sekor Ideal adalah sekor (5) Sangat Setuju (SS) x Banyak Responden (5 x banyak responden)

Secara kontinu bisa digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3. Kriteria Interpretasi Skor

Persentase	Pernyataan
0-20%	Sangat Lemah
21-40%	Lemah
41-60%	Sedang
61-80%	Kuat
81-100%	Sangat Kuat

2. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen artinya kesahihan alat ukur, dimana instrumen dapat dikatakan valid bila memenuhi kriteria yang valid, sehingga instrumen penelitian yang digunakan bisa diyakini keabsahan data yang diperoleh.

$$\text{Rumus: } r \text{ hitung} = \frac{(n \sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\})}}$$

Diketahui:

- r hitung : Koefisien yang dicari
 $\sum x$: Jumlah skor Item
 $\sum y$: Jumlah skor Item keseluruhan

Selanjutnya menghitung Uji-t

$$\text{Rumus: } t \text{ hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Dimana:

- t hitung : nilai yang dicari
r : koefisien hasil perhitungan
n : jumlah responden
 α : 1%, 5%, 10% tergantung yang mana dipakai

Tabel 4. Kaidah Kepustakaan Validitas Instrumen

t hitung > t tabel	Dinyatakan VALID
t hitung < t tabel	Dinyatakan TIDAK VALID

3. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen artinya mengukur alat ukur atau konsistensi alat ukur, dimana penggunaan alat ukur jika dilakukan beberapa kali atau waktu yang berbeda hasilnya relatif sama. Uji reliabilitas terdapat dua cara: Metode belah dua atau *split half (Product Moment)* dan Metode Spermman Broun. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan metode Product Moment.

4. Regresi Sederhana

Regresi adalah proses meramalkan, memprediksi, memproyeksikan masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang agar kesalahan dapat diperkecil. Sedikitnya ada perdebatan kegunaan regresi adalah dapat memprediksikan variabel Y jika variabel X diketahui.

Regresi sederhana dapat dianalisis didasarkan adanya hubungan fungsional atau korelasi variabel X terhadap Y.

$$\text{Rumus: } Y = a + bx$$

Dimana:

Y : variabel terikat yang dipertanyakan

X : variabel bebas yang diketahui

a : nilai koefisien harga y jika x = 0

b : nilai arah yang diprediksikan

$$a = \frac{\sum y + b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekolah SMK PGRI 1 Cimahi

Di SMK PGRI 1 Cimahi beralamat di Alamat Jl. Terusan GG. Karya Cimahi Rt/Rw 01/18 Desa/Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi mempunyai Ruang Kelas 23 dan Lab 2, dan Perpus 1 Total 26. Rombongan belajar 23, Guru 29 Tenaga Kependidikan 8 (PTK 37) dan Peserta didik 754 siswa, jarak sekolah 1 Km dari kantor Walikota Cimahi.

Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan statistik menggunakan program SPSS diperoleh: Uji Reliabilitas menyatakan angket RELIABILITAS karena $0,890 > r_{tabel} = 0,256$ Maka angket dapat diterima karena reliabilitas atau terpercaya/konsisten. Analisis regresi sederhana (*Simple Linier Regression*) digunakan untuk mengukur besaran pengaruh suatu variabel bebas atau variabel independen atau variabel predictor atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y, maka uji regresi sederhana menggunakan SPSS maka persamaan REGRESI LINEAR SEDERHANA adalah $Y=a+bX$.

Tabel 5. Koefisien Sig

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.530	4.270		3.403	.001
Pendidikan Politik	.395	.059	.540	6.663	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik

$a = 14,530$

$b = 0,395$ yakni mengandung arti bahwasanya setiap penambahan 1% Pendidikan Politik (X), maka Partisipasi politik (Y) akan meningkat sebesar 0,395

Maka persamaannya adalah: Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendidikan Politik (X) berpengaruh positif terhadap Partisipasi Politik (Y) dengan REGRESI LINIER SEDERHANA adalah $Y=14,530+0,395X$

Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak.

H1 : Ada pengaruh yang signifikan pendidikan politik dengan partisipasi pemilih pemula (survei penelitian tentang pemilukada walikota Cimahi kaitannya dengan mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi)

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pendidikan politik dengan partisipasi pemilih pemula (survei penelitian tentang pemilukada walikota Cimahi kaitannya dengan mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi)

Tabel 6. Koefisien Uji Hipotesis Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.530	4.270		3.403	.001
Pendidikan Politik	.395	.059	.540	6.663	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik

Berdasarkan output diatas diketahui nilai t hitung sebesar 6,663

$$\text{Maka } \frac{\alpha}{2} = \frac{0,01}{2} = 0,005$$

Derajat kebebasan (df)= n-2 = 110-2= 108

Nilai 0,005 ; 108

Karena nilai t hitung 6,663 > 2,660 maka HO di tolak dan Hi diterima

Besaran Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

Tabel 7. Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.291	.285	4.63623

a. Predictors: (Constant), Pendidikan Politik

Dari data di atas dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan pendidikan politik dengan partisipasi pemilih pemula (survei penelitian tentang pemilukada walikota Cimahi kaitannya dengan mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi) dengan total 29,1%.

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada pengujian variabel pendidikan politik (X) dengan skala likert yang berdasarkan teori dari Sunarso (2007:23-24) mengatakan pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Membuktikan bahwa pendidikan politik di SMK PGRI 1 Cimahi memiliki kategori kuat: dengan jumlah responden 110 dari kelas XII, terdapat hasil dimana memiliki pencapaian skor 79,46% dimana untuk penanaman nilai-nilai politik di SMK PGRI 1 Cimahi memiliki skor sebesar 81,39% responden menyatakan sangat setuju terhadap penanaman nilai-nilai politik, 78,82% responden menyatakan setuju dengan berpartisipasi dalam politik, dan 78,18 responden setuju dengan kesadaran akan hak dan kewajiban. Berdasarkan rata-rata dari data yang didapatkan, bahwasanya 79,46% menyatakan setuju, dengan demikian bahwa responden setuju terhadap adanya pendidikan politik di SMK PGRI 1 Cimahi.

Berdasarkan hasil penelitian variabel Y ini membuktikan bahwasanya pada pengujian variabel partisipasi pemilih pemula (X) dengan masih menggunakan skala likert yang menurut Subakti (2010:144) mengatakan Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Membuktikan bahwa partisipasi pemilih pemula di SMK PGRI 1 Cimahi memiliki tingkat kategori kuat: dengan jumlah responden 110 dari kelas XII, terdapat hasil dengan skor 71,38%, dimana dari empat sub-variabel dengan 72,48% responden menyatakan sebagai partisipasi aktif, 66,24% responden menyatakan bukan partisipasi apatis, 70,48% responden menyatakan bukan pula sebagai partisipasi militan radikal, dan 76,3% responden menyatakan bukan partisipasi pasif, dengan demikian bahwa responden cenderung sebagai responden dengan tingkat partisipasi sebagai pemilih pemula sebesar 71,38%.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran angket, di ketahui untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan pendidikan politik terhadap partisipasi politik dalam hal ini pemilih pemula, maka diperoleh sebagai berikut:

- a. Sebesar 79,46% responden menyatakan setuju dengan pendidikan politik yang diajarkan melalui mata pelajaran PPkn di SMK PGRI 1 Cimahi
- b. Tingkat partisipasi pemilih pemula di SMK PGRI 1 Cimahi sebesar 71,38%
- c. Pengaruh yang diberikan pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih pemula sebesar 29,1%.

Besaran pengaruh tersebut memang bila dilihat dalam segi ukuran angka, sangatlah tidak memuaskan karena tidak mencapai lima puluh persen minimalnya, namun sebagaimana penelitian yang tanpa memasukan unsur subjektif dan keragu-raguan, peneliti dengan sebenar-benarnya dan seobjektifnya hasil sesuai dengan fakta yang ada. Dan bisa di ambil kesimpulan bahwasanya terdapat

ada pengaruh yang signifikan pembelajaran politik dengan partisipasi pemilih pemula (survei penelitian tentang pemilukada walikota Cimahi kaitannya dengan mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi sebesar 29,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid dan Lutfi, J. (2010). *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum*. Jakarta: Gramedia
- Hemafitria, H. R. (2016). *Pembelajaran Pkn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula*. Edukasi: Jurnal Pendidikan, 13(2), 175-189.
- Juanda. (2012). *Pengaruh Pembelajaran Pkn Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Perilaku Memilih Pemilih Pemula (Kabupaten Aceh Timur)*. Jurnal CIVICUS, Volume 18, Nomor 1, Juni 2014,1-19. Tersedia di <http://jurnal.pnl.ac.id/?p=1721>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sunarso. (2007). *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*. Jurnal Civics, 20-40. Tersedia di <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6026/5218>
- Yuniarto, B. (2013). *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.
- Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.